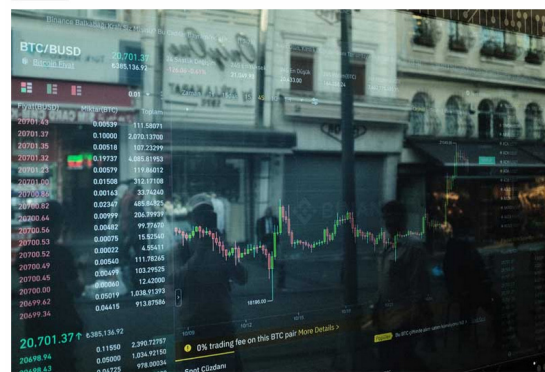




News Title : Mengebut Bursa Kripto Sebelum Ganti Tahun	
Media Name : Koran Tempo	Journalist : Caesar Akbar
Publish Date : 03 November 2022	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 330,000
Resources : Didid Noordiatmoko (pelaksana tugas Kepala Bappebti), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti), Teguh Kurniawan Harmanda (Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo)), Rob Raffael Kardinal (Ketua Asosiasi Konsumen Kripto), Bhima Yudhistira (Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies)	Ads Value : 110,000
Section/Rubrication : Ekonomi dan Bisnis	Topic : kripto

Mengebut Bursa Kripto Sebelum Ganti Tahun

Caesar Akbar
 Kamis, 3 November 2022
 Indonesia akan jadi negara pertama yang memiliki bursa kripto. Bappebti menargetkan bursa aset digital ini bisa meluncur pada akhir 2022.



Kantor Bappebti di Turki, 27 Oktober 2022. Reuters/Ismail Turhan/Catapan

JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus menggeber pembentukan **bursa kripto**. Targetnya, bursa aset digital tersebut dapat diluncurkan pada akhir 2022. Peluncuran tersebut telah molor dari target sebelumnya, yakni pada akhir tahun lalu.

"Harapan saya, tahun ini beres," ujar pelaksana tugas Kepala **Bappebti**, Didid Noordiatmoko, kepada awak media, kemarin. Ia berharap bursa bisa diluncurkan sejalan dengan Revisi Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dan sebelum disahkannya Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Dengan demikian, pengaturan dan bursa kripto dapat disempurnakan sebelum nantinya regulasi dan pengawasan komoditas ini diilhkan ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Seperti diketahui, RUU PPSK akan memindahkan pengaturan dan pengawasan aset kripto ke dua lembaga tersebut.

Didid mengatakan, bursa kripto tak kunjung diluncurkan lantaran belum benar-benar siap. Menurut dia, pembentukan bursa memerlukan waktu lantaran belum ada acuan alias *benchmark*-nya. Apabila jadi diluncurkan pada akhir tahun ini, bursa kripto Indonesia akan menjadi yang pertama di dunia.

"Kami mencoba agar risikonya kecil. Kami ingin pastikan semua bisa sinkron dan bisa menghadapi permasalahan ke depan," tutur Didid. Secara garis besar, Didid menyampaikan bahwa bursa kripto akan banyak meniru dan memodifikasi dari model Bursa Efek Indonesia. Rencananya, bursa akan diluncurkan bersama dengan perusahaan kuring dan kustodian khusus aset kripto.

Didid mengatakan, dalam perancangan bursa tersebut lembaganya telah menerima masukan dari berbagai pihak, dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu, Bappebti pun telah menyisir berbagai lubang yang menganga pada pengaturan bursa tersebut.



Penyebab Bursa Kripto Tertunda

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Tirta Karma Senjaya, menjelaskan ada beberapa alasan tertundanya peluncuran bursa kripto dan ekosistemnya. Salah satunya adalah pergantian pengurus pada Bursa Berjangka Digital atau Digital Futures Exchange (DFX) sebagai penyelenggara bursa kripto, sehingga perlu ada *fit and proper test* kembali.

Di samping itu, Bappebti tengah merampungkan revisi Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 yang salah satunya mengatur soal bursa. "Kesiapan sistem juga perlu diecek kembali karena jika revisi Peraturan Bappebti Nomor 8/2021 disahkan, harus ada penyesuaian kembali," ucap Tirta.

Selanjutnya, untuk kliring, Tirta mengatakan telah ada perusahaan dengan persyaratan yang lengkap. Kini, calon perusahaan kliring itu tinggal melewati tahapan uji kelayakan, cek fisik, dan lainnya. Adapun komponen dalam bursa kripto yang masih jauh dari siap adalah kustodian. Ia menuturkan, perusahaan yang mendaftar sudah ada, namun menghadapi kendala modal dan pengalaman.

"Memang ada beberapa kustodi dari luar yang mau masuk. Kami kasih opsi apakah mau buka perusahaan atau mau akuisisi perusahaan yang sudah terdaftar. Supaya modal dan SDM dibantu," tutur Tirta.

Tirta mengatakan hadirnya bursa dapat memberikan kenyamanan dan keamanan investor **aset kripto** untuk bertransaksi di dalam negeri. Seperti diketahui, saat ini perdagangan kripto cenderung dilakukan lintas-batas negara dan wilayah. Sehingga tak sedikit investor Indonesia bertransaksi di platform perdagangan aset kripto di luar negeri.

Keamanan itu salah satunya diwujudkan dengan adanya tiga komponen ekosistem bursa kripto tadi, serta arbitrase. "Di mana penyelesaian permasalahan bisa diselesaikan oleh perusahaan pedagang. Kalau tidak selesai, masuk ke bursa. Kalau bursa enggak selesai, bisa masuk ke arbitrase atau pengadilan," ujarnya. Nantinya bursa juga akan memiliki wewenang mensuspensi perdagangan untuk menjamin keamanan investor.

Di samping itu, Tirta mengatakan kehadiran bursa akan memudahkan pencatatan transaksi kripto di Indonesia. "Karena mereka akan merekap catatan dari seluruh pedagang. Semakin banyak pedagang, kami tidak mungkin minta catatan masing-masing pedagang, lebih enak dari bursa."



Ilustrasi grafik saham kripto, 4 September 2022. REUTERS/Dado Ruvic

Sudah Ditunggu Pedagang Kripto

Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh Kurniawan Harmanda, mengatakan para pedagang kripto terus menunggu hadirnya bursa lantaran ingin diakui sebagai pedagang aset kripto secara penuh. Selama ini, mereka masih terdaftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto karena bursa kriptonya belum juga diluncurkan. "Kalau sudah ada bursa, ini adalah yang pertama di dunia. Apakah ini sesuai dengan kebutuhan industri kripto, kami belum tahu karena tidak ada contohnya," ujarnya.

Bukan hanya pedagang, para investor aset kripto juga menunggu hadirnya bursa tersebut. Ketua Asosiasi Konsumen Kripto, Rob Raffael Kardinal, mengatakan salah satu hal yang paling diperhatikan konsumen dalam ekosistem bursa kripto adalah soal penyimpanan aset, sehingga adanya kustodian menjadi penting. "Yang bisa difokuskan adalah kustodian. Kami ingin setidaknya tahu posisinya di mana," ujar dia.

Menurut Raffael, posisi aset menjadi penting apabila berkaca pada kasus Zipmex Indonesia beberapa waktu lalu. Ia mengatakan kasus itu terjadi lantaran investor tidak mengetahui di mana aset investor disimpan. Setelah terjadinya masalah, investor baru mengetahui bahwa asetnya digunakan lagi untuk *trading* dan dimasukkan ke tempat yang bermasalah. "Ujung-ujungnya jadi berantakan. Jadi, kustodian penting. Itu kunci untuk mengetahui posisi aset orang Indonesia di mana dan pemerintah bisa memantau itu."

Ia mengatakan, dengan ekosistem yang berjalan dengan baik, konsumen akan semakin nyaman bertransaksi di dalam negeri ketimbang di pedagang-pedagang luar negeri. Pelayanan itu dianggap penting lantaran kini pemerintah juga sudah menarik pajak untuk transaksi kripto.

"Kami ingin *exchange* yang sudah ada sekarang bisa menjadi pedagang fisik aset kripto dan bukan hanya masih calon. Jadi, konsumen tidak bingung soal keamanan. Kami dorong bursa bisa dipercepat," ujar Raffael.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa kehadiran pengaturan tata kelola kripto yang komprehensif, termasuk dengan adanya bursa dan ekosistemnya, penting dilakukan lantaran perkembangan industri aset digital yang sangat pesat.

Berdasarkan catatan lembaganya, dalam lima tahun terakhir aset kripto telah menyaingi berbagai instrumen investasi yang sudah lama ada. "Sebanyak 55 persen investor membeli **Bitcoin** satu tahun sebelumnya, yang berarti daya tarik aset kripto meningkatkan jumlah investor retail dalam waktu singkat," ujar Bhima.

Dengan kondisi tersebut, ia mengatakan, Bappebti seharusnya menitikberatkan pengaturan pada mitigasi risiko yang muncul di industri kripto. Misalnya dengan adanya perbaikan teknis persyaratan modal minimum bursa berjangka, lembaga kliring, dan tempat penyimpanan aset kripto, sehingga tidak menghambat berkembangnya infrastruktur perdagangan aset kripto di Indonesia. "Bappebti juga bisa membuka kesempatan kepada bursa berjangka yang ada untuk terlibat dalam perdagangan aset kripto."